



indeks

- 1 KPEI Tetapkan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagai Agunan *Offline*
- 2
- 3 Tingkatkan Efisiensi melalui Penyelesaian Transaksi Level AK dalam Transaksi Ekuiti
- 4 Penyesuaian Mekanisme Agunan KPEI: Peningkatan Batasan Bank Garansi hingga Pengutipan *Fee* Pengelolaan Agunan
- 5 Panen Penghargaan di Kompetisi LACP Vision Award 2022
- 6 Pasar Modal Siap Menangkap Potensi Besar Transisi Energi
- 7 Statistik
- 9 Event Highlight

KPEI Tetapkan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagai Agunan *Offline*

KPEI secara resmi telah menambahkan Unit Penyertaan Reksa Dana menjadi daftar agunan offline yang dapat diterima sebagai jaminan dalam penyelesaian transaksi bursa.

Melalui Peraturan KPEI Nomor II-12 Tentang Penempatan Agunan Untuk Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas, Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak investasi kolektif, dan Pinjam Meminjam Efek tanggal 15 Agustus 2023, KPEI menambahkan daftar agunan *offline* berupa Unit Penyertaan Reksa Dana, melengkapi agunan yang sudah ada sebelumnya. Adapun, Unit Penyertaan Reksa Dana yang dapat diagunkan secara *offline*, yaitu Unit Penyertaan Reksa Dana Saham, Unit Penyertaan Reksa Dana Pasar Uang, Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap hingga Unit Penyertaan Reksa Dana Campuran.

Menurut Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko KPEI, Satya Birawa, dalam penerimaan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dapat dijadikan sebagai agunan *offline*, KPEI menerapkan batasan maksimum nilai dengan mempertimbangkan nilai aktiva bersih, umur Reksa Dana, dan afiliasi antara AK dan manajer investasi.

Sementara itu, batasan maksimum nilai yang diperhitungkan sebagai agunan atas Unit Penyertaan Reksa Dana setiap Anggota Kliring (AK) ditetapkan Rp100 miliar, sedangkan nilai maksimum Unit Penyertaan Reksa Dana untuk setiap jenis reksa dana, yaitu Unit Penyertaan Reksa Dana Saham, Unit Penyertaan Reksa Dana Pasar Uang, dan Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap masing-masing Rp50 miliar. Selanjutnya, Unit Penyertaan Reksa Dana Campuran Rp25 miliar.

KPEI juga mewanti-wanti Unit Penyertaan Reksa Dana yang diperhitungkan sebagai agunan

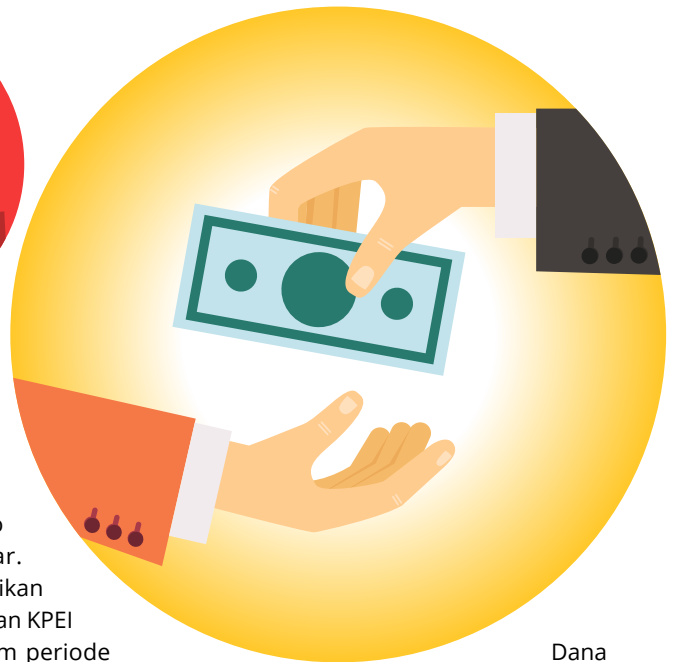
Menjelang akhir kuartal III/2023, KPEI telah berhasil mencatatkan berbagai pencapaian Perusahaan, mulai dari penerapan kebijakan terkait agunan hingga penghargaan yang didapatkan.

Pada *Headline* IDCclear News Edisi 3-2023, akan dibahas tentang implementasi reksa dana sebagai agunan *offline*. Kemudian pada *Artikel Khusus*, tersedia informasi mengenai upaya penyempurnaan sejumlah proses bisnis melalui Mekanisme Penyelesaian Transaksi Level AK dalam Transaksi Ekuiti hingga penyesuaian mekanisme agunan di KPEI.

Selanjutnya, pada *Artikel Khusus* akan dibahas tentang penghargaan LACP Vision Award Annual Report Competition yang berhasil diraih KPEI, yang menempatkan Perusahaan di peringkat ke-63, dari sekitar 1.000 perusahaan di dunia, yang mengikuti kompetisi tersebut, serta *Insight* mengenai transisi energi di industri pasar modal.

Akhir kata, Redaksi mengucapkan selamat membaca dan semoga IDCclear News ini dapat bermanfaat untuk pembaca.

Salam Semangat,
Redaksi



akan ditetapkan secara berkala dengan mempertimbangkan risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar. Penetapan akan disampaikan dalam bentuk pengumuman KPEI secara berkala atau dalam periode tertentu.

Kepala Unit Pengelolaan Dana Jaminan Natalina I.A. Hutapea mengatakan KPEI akan mengeluarkan daftar Unit Penyertaan Reksa Dana yang dapat dijadikan agunan oleh AK secara berkala setiap tiga bulan. "Secepatnya, daftar Unit Penyertaan Reksa Dana akan kami keluarkan. Harapannya sih bisa tahun ini. Pada saat bersamaan, kami juga terus melakukan sosialisasi, dari mulai aspek legal, sisi bisnis hingga proses operasionalnya," jelas Natalina.

Satya Birawa menjelaskan bahwa agunan pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme manajemen risiko yang mendukung fungsi KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP). Seiring berjalannya waktu, KPEI terus melakukan pembenahan kebijakan terkait agunan agar semakin optimal, termasuk salah satunya dengan penambahan reksa dana sebagai agunan *offline*. "Penetapan Unit Penyertaan Reksa Dana sendiri sebagai agunan sudah menjadi kebijakan yang lazim dilakukan oleh lembaga-lembaga kliring di sejumlah negara. KPEI sendiri sudah mengkajinya cukup lama, yaitu sejak 2018," jelas Satya.

Satya menyebut alternatif Unit Penyertaan Reksa Dana sebagai agunan *offline* ini adalah wujud dan komitmen dari KPEI untuk meningkatkan layanan kepada AK dan mengikuti *best practices* di dunia internasional. Selain itu, sebelumnya memang juga sudah ada permintaan dari AK agar dapat menempatkan Unit Penyertaan Reksa

Dana sebagai agunan di KPEI.

"Jadi setelah ada permintaan, kami merespons dengan melakukan survei di lembaga-lembaga kliring di luar negeri, kemudian melakukan *benchmarking*," tambah Satya.

Natalina turut menjelaskan bahwa pengelolaan agunan merupakan perangkat pengendalian risiko yang diterapkan KPEI untuk mengelola risiko kredit *counterparty* dari AK, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 26 tahun 2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. "Selain berfungsi untuk pengelolaan risiko jaminan penyelesaian transaksi bursa, agunan yang disetorkan AK dapat digunakan KPEI untuk penyelesaian transaksi bursa, baik untuk kepentingan AK maupun nasabahnya," jelas Natalina.

Selain itu, guna melakukan mitigasi risiko kredit untuk meminimalisir dampak dari risiko yang terjadi, KPEI juga memberlakukan mekanisme *haircut* atau pemotongan nilai barang pada setiap instrumen agunan yang diserahkan AK, yang dihitung berdasarkan harga pasar dikurangi faktor diskonto dengan persentase tertentu. Selanjutnya, KPEI juga melakukan penilaian pada setiap agunan dengan memperhitungkan nilai *haircut* dan besaran persentase *eligible* agunan maupun batasan yang ditetapkan untuk instrumen agunan tersebut.

[TIM REDAKSI]



Penerbit:

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Penasihat:

Direksi

Penanggung Jawab:

Sekretaris Perusahaan

Dewan Redaksi:

Lucia Sintha Sari, Arief Setiawan, Rivanie Novalia, dan Mohamad Farhan Fawwaz

Alamat Redaksi & Sirkulasi:

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Lt. 5
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 021-515 5115; 515 5125

Fax : 021-515 5120

Toll Free : 0800-100-KPEI (5734)

Email : customer.care@idclear.co.id

Website : www.idclear.co.id

Tingkatkan Efisiensi melalui Penyelesaian Transaksi Level AK dalam Transaksi Ekuiti



Pertumbuhan pesat atas jumlah nasabah dan jumlah penerbit efek, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan volume, nilai, maupun frekuensi transaksi bursa, mendorong KPEI untuk melakukan penyempurnaan proses bisnis demi peningkatan efisiensi dan kapasitas layanan transaksi kliring.

KPEI saat ini tengah menggodok rencana untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi bersifat ekuitas di tingkat Anggota Kliring (AK) dengan menggunakan mekanisme *Net Omnibus Segregation Account* (NOSA), namun dengan tetap berpedoman pada konsep-konsep dan mekanisme standar terkait dengan segregasi rekening.

Menurut Jerri Parulian, Kepala Divisi Riset dan Manajemen Proyek KPEI, penyelesaian Omnibus di level nasabah merupakan bentuk penyesuaian KPEI atas proses penyelesaian transaksi bursa dengan praktik yang diterapkan secara umum di *Central Counterparty* (CCP) di berbagai negara. "Kami melakukan *benchmarking* ke CCP di luar, seperti Muqassa di Arab Saudi, CCP Austria dan Euronext Clear di Eropa, dimana semuanya memperlihatkan manfaat dari segregasi rekening omnibus yang mengikuti standar internasional," jelas Jerri.

Sejumlah manfaat akan didapatkan dengan penerapan penyelesaian omnibus di level nasabah, meliputi kemudahan pengelolaan dengan adanya pemisahan penggunaan antara rekening penyelesaian dan rekening jaminan. Kemudian, terciptanya efisiensi pemenuhan kewajiban terhadap KPEI karena penyelesaian dilakukan secara

net untuk seluruh nasabah. "Kalau tadinya nasabah memberikan kepada AK, kemudian AK memberikan kepada KPEI sesuai dengan daftar hak dan kewajiban, nanti prosesnya cukup di tingkat AK saja sehingga tidak terjadi *gross*, tetapi *net*," tambah Jerri.

Kepala Unit Riset dan Pengembangan Bisnis KPEI, Waode Diah Anjani, menambahkan manfaat lain yang akan dirasakan dengan adanya penyelesaian omnibus ini adalah adanya kecepatan proses *settlement*, dimana proses penyelesaian menjadi lebih cepat sehingga dapat mengurangi waktu dan risiko operasional. Kemudian, mekanisme ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap praktik AK yang berperan sebagai *General Clearing Member* untuk beroperasi secara lebih efisien dan sederhana dibandingkan dengan sebelumnya karena dapat fokus untuk penyelesaian tanpa harus mengelola hingga level nasabah. Selain itu, penerapan penyelesaian Omnibus di level nasabah bisa membuat agunan semakin optimal. Pasalnya, risiko yang diperhitungkan menjadi lebih kecil sehingga nilai agunan yang dimiliki dapat lebih optimal terhadap trading limit.

Waode kembali menambahkan bahwa segregasi rekening merupakan

bagian dari manajemen risiko. "Ketika ada AK yang gagal, KPEI yang punya kewajiban untuk memfasilitasi pemindahan *collateral* dari nasabah, jadi dimudahkan dengan adanya pemisahan rekening. Konsep-konsep ini yang terus disosialisasikan kepada AK," jelas Waode.

Untuk membuat implementasi dari mekanisme segregasi rekening omnibus ini berjalan lancar, dalam proses persiapan menuju pengembangan sistem di tahun 2024, KPEI berupaya untuk dapat menerima masukan sebanyak-banyaknya dari AK. "Dengan demikian, diharapkan konsepnya akan matang, baik untuk KPEI maupun untuk AK nantinya," jelas Waode.

Selain mendukung peningkatan jumlah investor maupun frekuensi transaksi dengan adanya sistem yang lebih ringkas, maka ke depan sistem ini bisa lebih mendukung jumlah instruksi yang lebih banyak lagi. "Ini sejalan dengan *roadmap* di pasar modal. KPEI juga tetap menjaga segregasi rekening dari setiap individu atau nasabah sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap penyelesaian dari nasabah dan AK," pungkas Jerri.

[TIM REDAKSI]

Penyesuaian Mekanisme Agunan KPEI: Peningkatan Batasan Bank Garansi hingga Pengutipan *Fee* Pengelolaan Agunan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan likuiditas transaksi di Bursa Efek Indonesia, KPEI melakukan penyesuaian atas mekanisme agunan yang selama ini diterapkan Perusahaan.

Melalui penerbitan dua Surat Edaran (SE) terbaru, yaitu SE No. 007/DIR/KPEI/0523 tentang Penempatan Agunan Bank Garansi tertanggal 16 Mei 2023 dan SE No. 009/DIR/KPEI/0823 tentang Biaya atas Jasa Pengelolaan dan Administrasi Agunan tertanggal 15 Agustus 2023, KPEI melakukan implementasi atas perubahan batasan Bank Garansi dan pengenaan biaya atas Jasa pengelolaan dan administrasi agunan.

SE No. 007/DIR/KPEI/0523 tentang Penempatan Agunan Bank Garansi tertanggal 16 Mei 2023 menjelaskan mekanisme perubahan batasan Bank Garansi, KPEI mengubah nilai besaran maksimum Bank Garansi yang dapat diterima sebagai agunan menjadi Rp500 miliar untuk setiap Anggota Kliring (AK), dari semula Rp100 miliar, sesuai dengan SE sebelumnya No. 005/DIR/KPEI/0622 tertanggal 27 Juni 2022.

Dalam aturan baru, KPEI membuat batasan Bank Garansi yang dapat diterima sebagai agunan melalui kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). KPEI menetapkan untuk kategori KBMI 4, nilai maksimum pemberian Bank Garansi per AK sebesar Rp300 miliar, KBMI 3 sebesar Rp200 miliar, dan KBMI 2 sebesar Rp100 miliar.

Sebagai informasi, POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum, perbankan dikelompokkan dalam 4 kategori KBMI. KBMI 1 untuk bank yang memiliki modal inti kurang dari Rp6 triliun. KBMI 2 untuk bank yang memiliki modal inti Rp6 sampai dengan Rp14 triliun. Lalu, KBMI 3 untuk bank yang memiliki modal inti Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun. Sementara itu, KBMI 4 untuk bank yang memiliki modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Menurut Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko KPEI, Satya Birawa, untuk menjaga keamanan penyelesaian transaksi dan mempertimbangkan risiko sistemik, KPEI tidak bisa menerima bank garansi, misalnya dengan nilai maksimum Rp500 miliar, hanya dari satu bank. "Ini sesuai dengan mekanisme manajemen risiko, sehingga harus kombinasi," jelas Satya.

Sementara itu, Kepala Unit Pengelolaan Dana Jaminan KPEI, Natalina I.A. Hutapea menambahkan, dalam mekanisme perubahan batasan bank garansi, KPEI juga mempercepat pencairan Bank Garansi, dari semula selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sejak penerimaan tuntutan penggantian dari KPEI, menjadi selambat-lambatnya 4 (empat) hari bursa. "Seiring dengan kebutuhan transaksi yang lebih besar, saat ini sudah ada beberapa AK yang mengagunkan Bank Garansi lebih dari Rp100 miliar," jelas Natalina.

Penetapan Biaya Jasa Pengelolaan dan Administrasi Agunan

Melalui SE No. 009/DIR/KPEI/0823 tentang Biaya atas Jasa Pengelolaan dan Administrasi Agunan tertanggal 15 Agustus 2023, KPEI secara resmi akan

mulai mengenakan kutipan *fee* atas jasa pengelolaan agunan Dana Minimum Kas (*Minimum Cash Collateral/MCC*). Menurut Natalina, penetapan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan KPEI No. II-12 tentang Penempatan Agunan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Khusus, Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Pinjam Meminjam Efek.

Adapun perhitungannya, yaitu hasil pengelolaan agunan berupa Dana Minimum Kas dikenakan biaya sebesar 10% dari pendapatan bersih MCC setelah memperhitungkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengenaan biaya atas jasa pengelolaan agunan berupa MCC dikenakan setiap 3 bulan, di mana bukti pengenaan biaya akan disampaikan di awal bulan berikutnya pada Januari, April, Juli, dan Oktober. "Setiap AK yang akan menjadi Anggota Kliring dipersyaratkan menempatkan minimum MCC Rp1 miliar. Lalu, setiap 3 bulan sekali, KPEI melakukan review atas aktivitas transaksinya dan bagaimana kebutuhan MCC-nya. MCC ini yang dikenakan *fee*," jelas Natalina.

Natalina menambahkan, selain *fee* pengelolaan agunan MCC, KPEI juga mengenakan biaya administrasi terhadap pengajuan masing-masing agunan, yaitu deposito Rp100 ribu/ deposito, bank garansi Rp300 ribu, perpanjangan/perubahan Bank Garansi Rp300 ribu, permintaan data khusus terkait agunan oleh AK Rp100 ribu untuk setiap permintaan, pengajuan konfirmasi audit terkait agunan Rp100 ribu, dan jasa penyimpanan agunan berupa saham, deposito atau Bank Garansi Rp1 juta per tahun.

[TIM REDAKSI]



Panen Penghargaan di Kompetisi LACP Vision Award 2022

Sebagai salah satu Self-Regulatory Organization (SRO) di pasar modal Indonesia, KPEI berhasil menunjukkan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan tahunan dengan meraih penghargaan tertinggi dalam kompetisi internasional LACP Vision Award 2022.

KPEI berhasil memanen buah dari komitmen dan konsistensi Perusahaan dalam menyajikan laporan tahunan berkualitas melalui ajang kompetisi laporan tahunan berskala global, LACP Vision Award 2022. Dalam ajang ini, KPEI mampu meraih penghargaan Platinum Award, penghargaan tertinggi yang sekaligus menempatkan KPEI di peringkat ke-63, dari sekitar 1.000 perusahaan di dunia, yang mengikuti kompetisi tersebut, dengan skor total yang diraih mencapai 99 dari total 100.

Selain penghargaan Platinum Award, KPEI juga berhasil mencatatkan prestasi dengan meraih peringkat 6 dalam Top 80 Reports di kawasan Asia-Pasifik, peringkat ke-5 dalam Top 20 Reports di Indonesia, Bronze Award untuk kategori *Best Letter to Shareholder*, dan *Best Technical Achievement Award*.

LACP merupakan institusi independen yang berkedudukan di Amerika Serikat yang berdiri pada 2001, yang secara periodik mengadakan kompetisi laporan tahunan perusahaan dan diikuti oleh berbagai perusahaan dari beragam kategori industri di seluruh dunia.

KPEI secara konsisten berusaha untuk memenuhi standar tertinggi dalam tata kelola perusahaan, dan penghargaan ini merupakan bukti konkret dari pencapaian tersebut. Prestasi ini diharapkan dapat terus memotivasi KPEI untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan dan komunikasi yang baik, dengan tujuan memberikan pelayanan yang prima bagi semua pemangku kepentingan.

Direktur Utama KPEI, Iding Pardi menyatakan Perusahaan selalu berkomitmen untuk menyampaikan laporan tahunan sebaik dan selengkap mungkin sesuai dengan standar tertinggi dan praktik internasional yang berlaku. "Meskipun tidak diwajibkan untuk mengikuti standar penyampaian laporan tahunan oleh emiten seperti yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan, namun sebagai regulator, KPEI tetap berupaya untuk mengikutinya. Jadi standar-standar yang tinggi itu kami jadikan acuan dan terus kami lakukan evaluasi setiap tahunnya," ujarnya.

Iding menyebut bawah akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang penting mengingat peran KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan di pasar modal Indonesia. Dengan tata kelola Perusahaan yang baik, KPEI dapat memberikan kenyamanan kepada pemangku kepentingan untuk menggunakan layanan Perusahaan.

"Penghargaan yang didapatkan menjadi bentuk apresiasi dan pengakuan dunia internasional atas kualitas penyampaian Laporan KPEI.

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi KPEI untuk

terus menunjukkan dedikasinya dengan memberikan layanan terbaiknya di pasar modal Indonesia, termasuk dalam hal penyampaian laporan kepada pemangku kepentingan."

Sekretaris Perusahaan KPEI, Lucia Sintha Sari menambahkan, Perusahaan terus memperkuat GCG Perusahaan antara lain melalui penyampaian laporan tahunan sebagai implementasi tahunannya. Laporan Tahunan 2022 mengangkat tema "*Integrating Financial Ecosystem through Broadened Role and Collaboration*", yang menggambarkan upaya KPEI dalam memperluas peranannya di industri keuangan Indonesia melalui fungsi pengawasan dan perlindungan pada ekosistem pasar. "Penghargaan LACP adalah wujud komitmen kepada *stakeholder*, melalui penyampaian informasi yang jelas dan tepat, agar para pemangku kepentingan antara lain dapat mengetahui langkah-langkah strategis Perusahaan yang sudah dijalankan," jelasnya.

Sementara itu, untuk konsep desain dan visual dari laporan tahunan 2022, Kepala Unit Komunikasi dan Informasi Publik Arief Setiawan menambahkan bahwa KPEI menggunakan budaya Indonesia berupa motif batik dari seluruh Indonesia, yang menggambarkan konsep integrasi perluasan peran yang akan dilakukan Perusahaan. "Kreativitas tema dan desain disajikan KPEI diiringi dengan penyampaian data yang berkualitas. KPEI berupaya untuk menyampaikan data secara benar, jelas, akurat, transparan, dan juga menarik sehingga informasinya bisa diterima oleh para pengguna laporan tahunan," katanya.

[TIM REDAKSI]



Indonesia baru saja secara resmi memiliki bursa karbon, yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, dengan potensi nilai transaksi perdagangan mencapai Rp3.000 triliun.

Pasar Modal Siap Menangkap Potensi Besar Transisi Energi

Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan peluncuran Bursa Karbon pada Selasa (26/9/2023) setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai Penyelenggara Bursa Karbon melalui surat keputusan OJK nomor KEP-77/D.04/2023 pada Senin (18/9/2023). Keberadaan bursa karbon diharapkan menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah untuk mencapai target *net zero emission* pada 2060.

Bursa Karbon adalah sistem perdagangan karbon dalam bentuk kredit karbon atau izin emisi. Izin emisi atau kredit karbon diberikan kepada perusahaan berdasarkan target emisi yang telah ditetapkan. Perusahaan yang berhasil mengurangi emisinya hingga dibawah target, maka perusahaan tersebut diberikan izin untuk menjual emisi berlebih yang mereka punya kepada perusahaan lain yang emisinya melebihi target. Bursa karbon adalah salah satu alat yang digunakan banyak negara untuk mencapai target emisi mereka sesuai dengan kesepakatan internasional seperti Protokol Kyoto ataupun Perjanjian Paris.

Bursa karbon menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan tren dunia yang sedang menyongsong era

ekonomi hijau. Keketuaan Indonesia dalam sejumlah kegiatan internasional, dari Forum G20 hingga ASEAN menjadi peluang bagi Indonesia menciptakan panduan pembangunan ekonomi berkelanjutan di level global, salah satunya di lingkup yang paling kecil melalui *Asean Taxonomy for Sustainable Finance* atau Taksonomi Asean yang Berkelanjutan. Hal ini relevan mengingat kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian negara-negara anggotanya.

Pada saat bersamaan, ASEAN juga telah terbukti sebagai kawasan yang stabil dan tangguh yang dapat menunjukkan kemajuan dalam integrasi keuangan. Taksonomi ASEAN adalah contoh nyata bagaimana anggota ASEAN memastikan kawasan ini tetap menarik bagi investor. Taksonomi ASEAN yang dikembangkan untuk membiayai transisi energi menjadi salah satu arah kebijakan menuju transisi bertahap dari bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan.

Ada tiga isu poin utama dan relevan dalam Taksonomi ASEAN, yakni bagaimana mekanisme transisi energi terbarukan menjadi roda pertumbuhan ekonomi ke depan, dukungan

pembiayaan transisi berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh negara anggota Asean, dan prinsip adil dan terjangkau yang wajib mendasari mekanisme transisi energi hijau.

Selain itu, komitmen untuk mengurangi emisi karbon hingga 43,2%, dari semula 41% menjadi salah satu aspek penting dan konkret dalam transisi energi karena artinya taksonomi Indonesia mampu memobilisasi berbagai pendanaan maupun komitmen nyata dari sektor swasta, terutama untuk pendanaan berkelanjutan dan juga untuk mekanisme transisi energi

Pasar modal pun ternyata berhasil membuktikan diri untuk berbuat konkret mengatasi perubahan iklim lewat Bursa Karbon maupun Taksonomi Hijau. Peluncuran bursa karbon yang dilakukan oleh BEI, tentunya menjadi *milestone* dalam perekonomian Indonesia. Namun, tentu saja jika kita tidak cukup berpuas diri dengan capaian tersebut. Sosialisasi harus terus digencarkan berbarengan dengan penguatan pengaturan tata niaga, regulasi hingga jaminan dan kepastian hukum agar potensi nilai perdagangan yang ditargetkan dapat benar-benar terealisasi.

[TIM BISNIS INDONESIA]



TRANSAKSI BURSA

	Frekuensi (kali)	Volume (lembar)	Nilai (Rp)
Total 2023	183.512.490	2.886.286.058.923	1.618.986.628.840.270
Rata-rata Harian 2023	1.176.362	18.501.833.711	10.378.119.415.643

Data sampai dengan 31 Agustus 2023

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

	Penyelesaian Transaksi Bursa		Efisiensi	
	Volume (lembar)	Nilai	Volume (%)	Nilai (%)
Total 2023	1.108.535.556.300	631.532.022.388.800	60,46	54,02
Tertinggi Harian	29.159.837.800	12.077.478.791.500	72,49	62,14
Rata-rata Harian	7.105.997.156	4.048.282.194.800	60,46	54,02
Terendah Harian	4.115.663.600	2.058.866.852.900	37,30	39,43

Data sampai dengan 31 Agustus 2023

ALTERNATE CASH SETTLEMENT (ACS)

	ACS		JUMLAH AK (ACS)	
	Volume	Nilai	AK Serah	AK Terima
Total	79.528.700	10.400.900.500	19	69
Tertinggi	59.157.300	6.729.142.875	3	19
Rata-rata	4.678.159	611.817.676	1	4
Terendah	100	77.000	1	1

Data sampai dengan 31 Agustus 2023

FASILITAS INTRADAY

Penggunaan (Rp)		Biaya (Rp)
218.392.558.026.087	Total Penggunaan	2.979.364.877
27.299.069.753.261	Rata-rata Bulanan	372.420.610
1.399.952.295.039	Rata-rata Harian	19.098.493

Data sampai dengan 31 Agustus 2023

POSISI DANA JAMINAN

Ekuiti Nilai (Rp) 4.872.862.210.149 Persentase 65,13%	Surat Utang Nilai (Rp) 1.087.103 Persentase 0,00%
Derivatif-Kontrak Berjangka Nilai (Rp) 601.922.904 Persentase 0,01%	Waran Terstruktur Nilai (Rp) 57.840.600 Persentase 0,00%
Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Ekuiti, KBIE dan Obligasi Nilai (Rp) 2.608.046.452.638 Persentase 34,86%	
Total Nilai (Rp) 7.481.569.513.394 Persentase 100%	

POSISI CADANGAN JAMINAN

Cadangan Jaminan	194.139.866.221
------------------	-----------------

Data sampai dengan 31 Agustus 2023



TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM EFEK

	Total			Rata-Rata Harian		Jumlah Hari
	Nilai	Volume	Frekuensi	Nilai	Volume	
Januari	4.219.289.700	1.388.400	16	136.106.119	44.787	31
Februari	1.370.875.800	360.200	3	48.959.850	12.864	28
Maret	4.794.436.500	1.993.800	7	154.659.241	64.316	31
April	554.930.000	98.000	3	18.497.666	3.266	30
Mei	9.782.996.400	3.822.000	19	315.580.529	123.290	31
Juni	3.874.880.000	616.500	6	129.162.666	20.550	30
Juli	6.387.134.700	1.008.700	12	206.036.603	32.538	31
Agustus	951.477.500	521.300	4	30.692.822	16.816	31
Total	31.936.020.600	9.808.900	70	131.423.953	40.366	243

Data sampai dengan 31 Agustus 2023

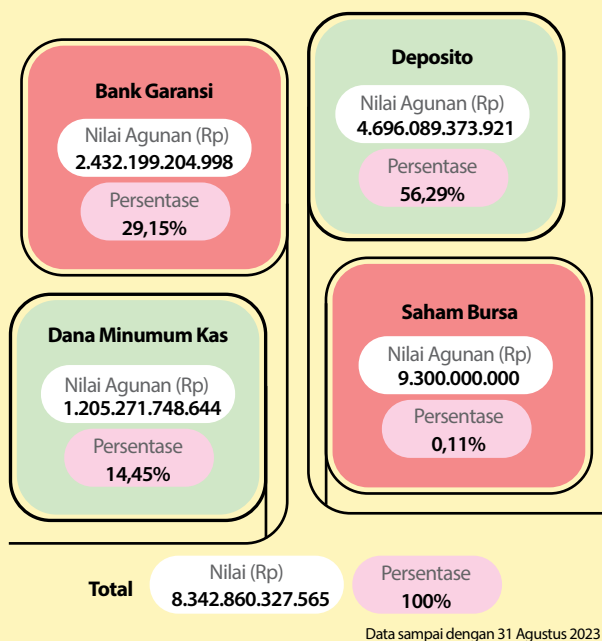


DATA TRANSAKSI TRIPARTY REPO

	Total			Total	
	Nilai	Volume		Nilai	Volume
Januari	-	-	Juli	51.000.000.000	78.476.200
Februari	35.000.000.000	56.000.000	Agustus	34.000.000.000	66.805.000
Maret	116.000.000.000	395.732.000			
April	10.000.000.000	15.000.000			
Mei	10.000.000.000	15.000.000			
Juni	-	-			
Total	256.000.000.000	627.013.200			

Data sampai dengan 31 Agustus 2023

KOMPOSISI AGUNAN OFFLINE



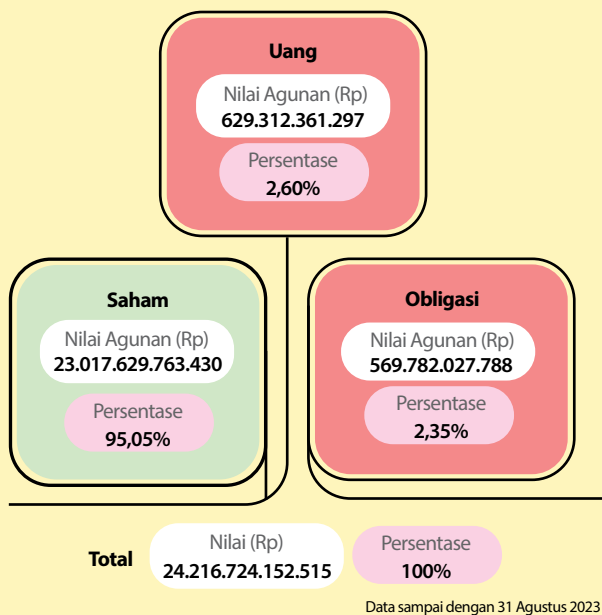
Data sampai dengan 31 Agustus 2023

TRANSAKSI DERIVATIF

	Frekuensi (kali)	Volume (kontrak)	Nilai (Rp)
LQ 45	-	-	-
IDX 30	326	487	23.712.993.000
Index Futures (Total)	326	487	23.712.993.000
Indonesia Government Bond Futures	-	-	-

Data sampai dengan 31 Agustus 2023

KOMPOSISI AGUNAN ONLINE



Data sampai dengan 31 Agustus 2023





The 23rd Asia-Pacific Central Securities Depository Group Cross Training Seminar

KPEI dan KSEI menjadi tuan rumah penyelenggaraan ACG CST ke-23 yang dilaksanakan di Bali, pada tanggal 19-22 Juni 2023.



Pasar Modal Indonesia Salurkan Bantuan untuk Pondok Pesantren di Jawa Timur

Pada 20 Juni 2023, KPEI bersama SRO lainnya kembali melaksanakan kegiatan CSR dalam rangka HUT ke-45 Pasar Modal Indonesia.



Pasar Modal Indonesia Dukung Percepatan Penurunan Tingkat Stunting di Sumatera Utara

Pada 4 Juli 2023, KPEI Bersama SRO lainnya, kembali melaksanakan kegiatan CSR dalam rangka memperingati HUT ke-45 Pasar Modal Indonesia.



KPEI Beri Bantuan untuk Tiga UMKM di Magelang

Pada 8 Juli 2023, KPEI melaksanakan kegiatan CSR dengan memberikan bantuan kepada tiga UMKM di Magelang yaitu, UMKM Dewi Wanu, UMKM Pandan Langit, dan UMKM Arum Art yang bergerak di bidang kerajinan tangan batik, gerabah, dan kerajinan daun pandan di daerah Borobudur



Leaders Talk - New Normal Era: an Overview from CFO perspective

Pada 21 Juli 2023, KPEI menyelenggarakan kegiatan sharing session berupa Leaders Talk dengan tema New Normal Era: an Overview from CFO perspective.



Pasar Modal Indonesia Berikan Dukungan Pengelolaan Sampah di Bali

Pada 26 Juli 2023, KPEI bersama SRO lainnya kembali melaksanakan kegiatan CSR berupa dukungan pengelolaan sampah di Bali yang diberikan dalam bentuk transportasi angkutan sampah, pendampingan, monitoring, dan evaluasi di wilayah Bali.



Pasar Modal Indonesia Beri Bantuan Untuk Penanggulangan Stunting di Nusa Tenggara Barat

Pada 27 Juli 2023, KPEI bersama SRO lainnya kembali memberikan bantuan berupa antropometri dan makanan tambahan pangan padat gizi kepada Dinas Kesehatan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung percepatan penurunan tingkat stunting di wilayah NTB.



Penyerahan Bantuan CSR Kepada Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia

Pada 7 Agustus 2023, KPEI bersama SRO lainnya memberikan bantuan kepada Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia untuk peningkatan prestasi olahraga dan kesejahteraan para atlet serta mantan atlet Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka



Pembukaan Perdagangan dan Konferensi Pers 46 Tahun Diaktifikannya Kembali Pasar Modal Indonesia

Dalam rangka memperingati 46 Tahun Diaktifikannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada 10 Agustus 2023, KPEI bersama OJK dan SRO lainnya melaksanakan kegiatan Pembukaan Perdagangan yang diikuti dengan kegiatan Konferensi Pers di Gedung Bursa Efek Indonesia



Pasar Modal Indonesia Beri Bantuan Kendaraan Pengangkut Sampah Kepada Pemerintah Kota Manado

Pada 21 Agustus 2023, KPEI Bersama SRO lainnya kembali melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan berupa armada pengangkut sampah yang bertujuan untuk mendukung program Pemerintah Kota Manado dalam menciptakan pengelolaan sampah yang baik dan profesional



Pasar Modal Indonesia Berikan Bantuan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang di Makassar

Dalam rangkaian CSR HUT ke-45 Pasar Modal Indonesia pada 22 Agustus 2023, KPEI Bersama SRO lainnya memberikan bantuan berupa kendaraan operasional kepada PMI Sulawesi Tenggara.



Pasar Modal Indonesia Salurkan Bantuan Kendaraan Operasional Kepada PMI Sulawesi Tenggara

KPEI Bersama SRO lainnya memberikan bantuan berupa kendaraan operasional kepada PMI Sulawesi Tenggara. Bantuan yang diberikan secara simbolis pada 24 Agustus 2023.